

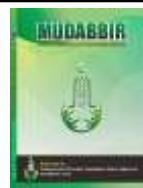


JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN: 2774-8391



Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan

Nurul Adinda Lubis¹, Uswatun Hasanah², Muhammad Ibnu³, Usiono⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: nuruladindalubis@gmail.com¹, uswah180104@gmail.com²,
ibnum8435@gmail.com³, usiono@uinsu.ac.id⁴

ABSTRAK

Kebijakan sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru sebagai faktor utama penentu mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kepala madrasah dan guru yang telah tersertifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan dampak positif terhadap kinerja guru, khususnya dalam aspek kedisiplinan, tanggung jawab profesional, perencanaan pembelajaran, serta pelaksanaan proses belajar mengajar, meskipun peningkatan kinerja tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih adanya pemahaman guru yang memaknai sertifikasi sebatas pemenuhan administratif. Dengan demikian, sertifikasi guru berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja guru, namun efektivitasnya perlu diperkuat melalui pembinaan berkelanjutan dan penguatan komitmen profesional guru agar berdampak maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Sertifikasi Guru, Kinerja Guru, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Madrasah

ABSTRACT

Teacher certification policy is a government effort to improve teacher professionalism and performance as a key factor in enhancing educational quality. This study aims to analyze the implementation of teacher certification policy and its contribution to improving teacher performance at MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan. This research employed a qualitative approach with a descriptive design, and data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the head of the madrasah and certified teachers. Data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings indicate that the implementation of teacher certification policy has been carried out in accordance with applicable regulations and has had a positive impact on teacher performance, particularly in terms of discipline, professional responsibility, lesson planning, and the implementation of the teaching and learning process. However, the improvement in teacher performance has not been fully optimal, as some teachers still perceive certification merely as an administrative requirement. Therefore, teacher certification contributes positively to improving teacher performance, but its

effectiveness needs to be strengthened through continuous professional development and reinforcement of teachers' professional commitment to maximize its impact on educational quality.

Keywords: Teacher Certification, Teacher Performance, Policy Implementation, Madrasah Education

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, salah satu upaya yang ditempuh untuk mencapai mutu pendidikan secara optimal adalah dengan menciptakan guru yang profesional serta memiliki kinerja yang baik.(Elvira Masengi et al., 2023) Guru yang berkualitas menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, karena perannya sangat dominan dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pemerintah melalui program sertifikasi guru berupaya meningkatkan kualitas, kompetensi, serta kesejahteraan guru agar mampu menjalankan tugas profesionalnya secara optimal. (R. K. Arifin, 2008:12)

Menurut Sitti Sahara Syamel & Jusman, (2024) Profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh penguasaan kompetensi akademik, tetapi juga oleh integritas pribadi dan kecakapan keguruan yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Guru memiliki beragam tugas yang diwujudkan dalam bentuk pengabdian, baik dalam bidang profesi, kemanusiaan, maupun kemasyarakatan. Dengan peran yang demikian strategis, keberadaan guru menjadi unsur yang sangat menentukan dibandingkan sumber daya pendidikan lainnya, yang sering kali tidak memberikan makna signifikan tanpa didukung oleh kualitas guru yang memadai.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada penyediaan sarana dan prasarana fisik, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan guru. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa kelengkapan fasilitas pendidikan, ketersediaan anggaran, kualitas peserta didik, kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, serta dukungan tenaga administrasi yang andal tidak akan menghasilkan mutu pendidikan yang optimal tanpa kehadiran guru yang kompeten dan profesional.(Melvin M. Simanjuntak et al., 2025:54) Guru merupakan komponen terpenting dalam proses belajar mengajar dan memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan pendidikan.(Sukarno et al., 2021:260)

Setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari eksistensi guru itu sendiri. Guru dipandang sebagai kunci keberhasilan lembaga pendidikan, bahkan berperan sebagai representasi utama kualitas suatu institusi pendidikan. Dalam perspektif yang lebih luas, guru juga merupakan agen perubahan di tengah masyarakat yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk terus meningkatkan kecakapan dan mutu keguruan secara berkesinambungan. Guru profesional adalah mereka yang memiliki penguasaan mendalam terhadap bidang yang diajarkan, mampu menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien, serta memiliki kepribadian yang matang.(Refi Mariska et al., 2024:23) Selain itu, guru juga dituntut memiliki kecakapan kerja yang baik dan kedewasaan berpikir, mengingat profesi guru menempati posisi strategis dalam kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat. Upaya pengembangan diri secara terus-menerus menjadi keharusan, sejalan dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat dan dinamika perkembangan sistem pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi langkah yang tepat dan

relevan. Salah satu aspek penting dalam undang-undang tersebut adalah ketentuan mengenai sertifikasi guru, yang didefinisikan sebagai proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru sebagai pengakuan atas profesionalitasnya. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi sebagai bentuk penghargaan terhadap kompetensi dan tanggung jawab profesional yang dimilikinya.(Yollanda Ferry & Khairul, 2023:79)

Program sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan, dan martabat guru.(Sumarni, 2020:23) Melalui kebijakan ini, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta kondisi jasmani dan rohani yang sehat guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Meskipun peningkatan kesejahteraan bukan tujuan utama, tunjangan profesi dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja guru agar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan sebagai salah satu lembaga pendidikan madrasah juga menerapkan kebijakan sertifikasi guru. Sebagian guru di madrasah ini telah memiliki sertifikat pendidik dan menerima tunjangan profesi. Namun demikian, peningkatan kinerja guru sebagai dampak dari sertifikasi masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Kinerja guru tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga dari kualitas proses pembelajaran, kedisiplinan, inovasi metode mengajar, serta tanggung jawab profesional dalam melaksanakan tugas pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan kinerja guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan sertifikasi guru diimplementasikan serta sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah dan pemangku kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan sertifikasi guru serta dampaknya terhadap kinerja guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali makna, proses, serta realitas sosial yang terjadi di lapangan secara komprehensif berdasarkan perspektif para informan. Mamasa, Bogdan dan Taylor dalam (Yustina, 2025:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati". Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui atau fenomena yang baru sedikit diketahui.

Penelitian dilaksanakan di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan. Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, kepala madrasah, serta pihak-pihak terkait yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan informan terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia, guru adalah manusia yang bertugas (profesinya mengajar). Dalam bahasa Inggris guru dikenal dengan sebutan teacher. Teacher memiliki arti "*a person whose occupation is teaching other*", yaitu seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain.(Pio Andeko, 2019:12) Pada dasarnya, Guru adalah seorang pendidik yang secara profesional memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Nunik Febi Nurhayanti, 2020:14) Dalam Pendidikan, guru adalah komponen penting dalam mengembangkan siswa, oleh karena itu guru harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar, mendidik, melatih dan membimbing peserta didik agar peserta didik sebagai siswa dapat belajar dengan baik.(Afra Muna et al., 2025:634)

Menurut Yamin dalam Afra Muna et al., (2025) Guru yang berkualitas akan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas pula. Dalam meningkatkan kualitas tersebut. sehubungan dengan hal tersebut pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), telah melakukan berbagai macam upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia dengan memberi perhatian khusus kepada para guru. Salah satu upayanya adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan peningkatan profesionalitas tenaga guru dengan kebijakan sertifikasi.(Yustina, 2025:5)

Istilah sertifikasi diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu "*certification*" yang memiliki arti pengesahan, keterangan, sertifikat, ijazah, diploma, brevet. *International Institute for Environment Development* (IIED), pengertian sertifikasi yaitu prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu proses, produk atau jasa sudah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang telah disepakati. Sertifikasi erat kaitannya dengan pelabelan produk guna proses komunikasi pasar.(Sumarni, 2020:37)

Terkait dengan sertifikasi guru Mulyasa dalam Kiky Amrynudin et al., (n.d: 23) mengatakan bahwa sertifikasi adalah pemenuhan kebutuhan agar bisa meningkatkan kompetensi profesional. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi guru atau calon guru yang ingin meningkatkan kompetensi dan atau memperoleh pengakuan sesuai profesi yang telah dipilihnya. Lebih lanjut Muslich dalam Malem Sendah Sembiring (2025:12) menyatakan bahwa sertifikasi merupakan proses dalam pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi persyaratan tertentu misalnya memiliki kualitas kompetensi, akademik, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dibarengi peningkatan kesejahteraan yang layak.

Dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa penyelenggaraan sertifikasi guru dilakukan melalui empat pola. Pertama, penilaian portofolio. Kedua, pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Ketiga, pemberian

sertifikat pendidik secara langsung, yang dilakukan melalui verifikasi dokumen oleh LPTK terhadap guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal strata dua (S2), baik sebagai guru kelas, guru bimbingan dan konseling, maupun pengawas, yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi serta memiliki golongan kepangkatan minimal IV/b atau angka kredit kumulatif yang setara. Keempat, pendidikan profesi guru (PPG), yaitu program pendidikan lanjutan setelah program sarjana atau sarjana terapan yang bertujuan menghasilkan guru profesional pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dengan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan.

Kebutuhan guru untuk melakukan sertifikasi pada dasarnya menurut Yamin (2006:7) bertujuan untuk: "(1) mengetahui kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan Pendidikan nasional, (2) menentukan proses dan hasil mutu pendidikan.(Subekti et al., 2024:27) Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Herdianti et al., (2024:310) yang mengungkapkan bahwa Kebijakan sertifikasi guru pada dasarnya bertujuan untuk melakukan seleksi atau penilaian terhadap kelayakan atau tidaknya seorang guru dalam mengajar. Hal tersebut dijadikan sebagai acuan utama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.

Sejalan dengan pendapat di atas, sertifikasi guru pada dasarnya memiliki manfaat untuk melindungi profesi guru dari perilaku tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Kemudian, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak professional. Hingga melindungi lembaga pendidikan tenaga pendidik (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal selain menyimpang dari peraturan yang berlaku.(Yunalis & Herman, 2018:113)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan telah diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Guru-guru yang telah mengikuti program sertifikasi pada umumnya telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, serta prosedur administrasi yang berlaku. Implementasi kebijakan ini dipahami oleh pihak madrasah sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja guru dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah, sertifikasi guru dipandang sebagai kebijakan strategis yang membawa perubahan positif terhadap kinerja guru. Kepala madrasah menyatakan bahwa "Guru yang sudah tersertifikasi terlihat lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Mereka lebih disiplin hadir di sekolah, lebih tertib dalam administrasi pembelajaran, dan lebih serius mempersiapkan bahan ajar sebelum masuk kelas."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi guru berimplikasi pada peningkatan kedisiplinan dan kesadaran profesional guru. Hal ini sejalan dengan pendapat Elvira Masengi et al. (2023) dan R. K. Arifin (2008) yang menegaskan bahwa profesionalisme guru menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan sertifikasi merupakan instrumen kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan guru yang telah tersertifikasi, ditemukan adanya perubahan dalam pola kerja dan sikap profesional guru. Salah satu guru menyampaikan "Sejak saya mengikuti sertifikasi, saya merasa dituntut untuk lebih profesional. Saya harus menyiapkan RPP dengan lebih matang, menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter siswa, dan melakukan evaluasi pembelajaran secara teratur."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sertifikasi mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalnya, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Temuan ini mendukung pandangan Refi Mariska et al. (2024) yang menyatakan bahwa guru profesional adalah guru yang menguasai materi ajar secara mendalam dan mampu menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien.

Selain itu, guru juga mengungkapkan bahwa tunjangan profesi yang diterima setelah sertifikasi memberikan dampak terhadap motivasi kerja. Seorang guru menyatakan "Tunjangan profesi yang kami terima bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kami sudah diakui sebagai guru profesional, sehingga kami merasa punya tanggung jawab moral untuk meningkatkan kinerja."

Temuan ini sejalan dengan pendapat Sumarni (2020) dan Yollanda Ferry & Khairul (2023) yang menyatakan bahwa tunjangan profesi bukan semata-mata bertujuan meningkatkan kesejahteraan, melainkan sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan martabat guru.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak sertifikasi guru terhadap kinerja belum sepenuhnya optimal pada semua guru. Kepala madrasah mengungkapkan "Masih ada sebagian kecil guru yang memandang sertifikasi hanya sebagai pemenuhan syarat administratif dan sumber tambahan penghasilan, sehingga pengaruhnya terhadap inovasi pembelajaran belum terlihat signifikan."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sertifikat pendidik, tetapi juga oleh integritas pribadi dan komitmen untuk terus mengembangkan kompetensi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sitti Sahara Syamel dan Jusman (2024) yang menekankan bahwa profesionalisme guru harus dibangun secara berkelanjutan melalui pengembangan diri dan etos kerja.

Dari sisi kelembagaan, pihak madrasah juga berperan dalam mendukung implementasi sertifikasi guru. Kepala madrasah menyatakan "Kami terus mendorong guru-guru yang sudah tersertifikasi untuk mengikuti pelatihan, diskusi kelompok, dan supervisi pembelajaran agar sertifikasi benar-benar berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas."

Upaya tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi guru perlu diiringi dengan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Melvin M. Simanjuntak et al. (2025) dan Sukarno et al. (2021) yang menegaskan bahwa guru merupakan komponen paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan, sehingga pemberdayaan guru harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja guru, terutama pada aspek kedisiplinan, perencanaan pembelajaran, dan tanggung jawab profesional. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih optimal, diperlukan penguatan komitmen guru, pembinaan berkelanjutan dari pihak madrasah, serta evaluasi

kebijakan agar sertifikasi tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan kesejahteraan, tetapi benar-benar menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan

Implementasi kebijakan sertifikasi guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor pendukung dan faktor penghambat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru.

1) Faktor Pendukung Implementasi Sertifikasi Guru

Salah satu faktor pendukung utama implementasi kebijakan sertifikasi guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan adalah dukungan dari pimpinan madrasah. Kepala madrasah memiliki peran strategis dalam mendorong guru untuk menjalankan tugas profesionalnya secara optimal setelah memperoleh sertifikat pendidik. Kepala madrasah menyatakan "Kami selalu memberikan dorongan kepada guru yang sudah tersertifikasi agar benar-benar menunjukkan profesionalismenya, terutama dalam pembelajaran di kelas dan kedisiplinan kerja."

Dukungan pimpinan tersebut diwujudkan melalui supervisi pembelajaran, evaluasi kinerja guru, serta pemberian motivasi agar guru terus meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional. Hal ini sejalan dengan pandangan Sukarno et al. (2021) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja guru.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya tunjangan profesi yang diterima oleh guru setelah mengikuti sertifikasi. Tunjangan ini memberikan dampak positif terhadap motivasi dan kesejahteraan guru. Seorang guru mengungkapkan "Dengan adanya tunjangan profesi, kami merasa lebih dihargai sebagai guru. Ini membuat kami lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik dan bertanggung jawab."

Pernyataan tersebut mendukung pendapat Sumarni (2020) yang menyatakan bahwa tunjangan profesi merupakan instrumen kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja guru, meskipun bukan tujuan utama dari program sertifikasi.

Selain itu, kesadaran dan motivasi internal guru juga menjadi faktor pendukung penting. Guru yang memiliki komitmen tinggi terhadap profesinya cenderung memanfaatkan sertifikasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seorang guru menyampaikan "Sertifikasi ini menjadi pengingat bagi saya bahwa status guru profesional harus dibuktikan dengan kinerja, bukan hanya dengan sertifikat."

Motivasi intrinsik ini memperkuat profesionalisme guru sebagaimana dikemukakan oleh Sitti Sahara Syamel dan Jusman (2024), bahwa integritas dan komitmen pribadi guru sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas profesionalnya.

2) Faktor Penghambat Implementasi Sertifikasi Guru

Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan

tingkat kesadaran dan pemahaman guru terhadap makna sertifikasi. Kepala madrasah menyatakan "Masih ada guru yang menganggap sertifikasi hanya sebagai syarat administratif dan sumber tambahan penghasilan, sehingga dampaknya terhadap kualitas pembelajaran belum maksimal."

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi belum sepenuhnya dipahami sebagai upaya peningkatan profesionalisme secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan temuan Herdianti et al. (2024) yang menyatakan bahwa sertifikasi akan efektif apabila diiringi dengan kesadaran profesional guru.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan kesempatan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru. Beberapa guru mengungkapkan bahwa pelatihan dan kegiatan pengembangan kompetensi masih belum dilakukan secara rutin. Seorang guru menyampaikan "Pelatihan setelah sertifikasi masih terbatas, sehingga kami kadang kesulitan untuk terus mengembangkan metode dan inovasi pembelajaran."

Keterbatasan ini dapat memengaruhi optimalisasi kinerja guru, mengingat profesi guru menuntut pengembangan kompetensi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan peserta didik, sebagaimana dikemukakan oleh Refi Mariska et al. (2024).

Selain itu, beban administrasi yang cukup tinggi juga menjadi salah satu faktor penghambat. Guru mengungkapkan bahwa kewajiban administrasi pembelajaran terkadang mengurangi fokus terhadap inovasi dan kreativitas dalam mengajar. Seorang guru menyatakan "Terkadang kami terlalu fokus pada kelengkapan administrasi, sehingga waktu untuk mengembangkan metode pembelajaran menjadi terbatas." Hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi telah mendorong peningkatan kinerja administratif, perlu adanya keseimbangan antara tuntutan administrasi dan kualitas proses pembelajaran di kelas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara dukungan pimpinan madrasah, motivasi dan kesadaran guru, kesejahteraan melalui tunjangan profesi, serta ketersediaan program pengembangan profesional berkelanjutan. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, sertifikasi guru berpotensi hanya menjadi kebijakan administratif tanpa dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

3. Analisis Pembahasan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, implementasi kebijakan sertifikasi guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang ditetapkan pemerintah, namun tingkat efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sertifikasi guru pada dasarnya dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

Hasil temuan lapangan memperlihatkan bahwa sertifikasi guru memberikan dampak positif terhadap kinerja guru, terutama pada aspek kedisiplinan, tanggung jawab profesional, serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Guru yang telah tersertifikasi cenderung menunjukkan kesadaran

yang lebih tinggi terhadap kewajiban profesionalnya, seperti penyusunan perangkat pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang lebih variatif, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran secara sistematis. Temuan ini menguatkan pandangan Yamin (2006) dan Subekti et al. (2024) yang menyatakan bahwa sertifikasi bertujuan untuk menilai kelayakan guru sebagai agen pembelajaran sekaligus meningkatkan mutu proses pendidikan.

Secara teoritis, profesionalisme guru tidak hanya diukur dari kepemilikan sertifikat pendidik, tetapi juga dari integritas pribadi, komitmen, serta kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Sitti Sahara Syamel dan Jusman (2024) yang menegaskan bahwa profesionalisme guru harus dibangun melalui pengembangan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional secara berkesinambungan. Dalam konteks MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan, sertifikasi telah menjadi pemicu awal peningkatan kinerja guru, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada motivasi internal dan dukungan kelembagaan.

Dari perspektif kebijakan publik, implementasi sertifikasi guru di madrasah ini mencerminkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh proses implementasi di tingkat satuan pendidikan. Dukungan kepala madrasah, mekanisme supervisi, serta pembinaan guru pasca-sertifikasi menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Melvin M. Simanjuntak et al. (2025) dan Sukarno et al. (2021) yang menegaskan bahwa guru merupakan komponen paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan, sehingga kebijakan pemberdayaan guru harus diikuti dengan penguatan sistem manajemen sekolah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru, seperti perbedaan tingkat pemahaman guru terhadap makna sertifikasi, keterbatasan program pengembangan profesional berkelanjutan, serta beban administrasi yang cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas sertifikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Temuan ini memperkuat pandangan Herdianti et al. (2024) bahwa sertifikasi guru akan berdampak signifikan apabila disertai dengan pembinaan berkelanjutan dan evaluasi kinerja yang konsisten.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan telah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi dan pengawasan. Sertifikasi tidak dapat dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mendorong profesionalisme guru secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah, kepemimpinan madrasah, dan komitmen guru menjadi prasyarat utama agar sertifikasi guru benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikasi guru dipahami oleh pihak madrasah sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru, serta

sebagai bentuk pengakuan formal terhadap kompetensi guru sebagai tenaga pendidik profesional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja guru, khususnya pada aspek kedisiplinan, tanggung jawab profesional, perencanaan pembelajaran, serta pelaksanaan proses belajar mengajar. Guru yang telah tersertifikasi cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap kewajiban profesionalnya dan menunjukkan upaya peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Tunjangan profesi yang diterima juga berperan sebagai faktor pendorong motivasi kerja, meskipun bukan tujuan utama dari program sertifikasi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan kinerja guru pasca-sertifikasi belum sepenuhnya merata. Masih terdapat guru yang memandang sertifikasi sebatas sebagai pemenuhan persyaratan administratif dan peningkatan kesejahteraan, sehingga dampaknya terhadap inovasi pembelajaran belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi guru sangat bergantung pada integritas pribadi, komitmen profesional guru, serta dukungan kelembagaan melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi guru di MTs Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan telah memberikan dampak positif terhadap kinerja guru, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Sertifikasi guru tidak dapat dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mendorong profesionalisme guru secara berkelanjutan guna meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Elvira Masengi, E., Lumingkewas, E., Brain Fransisco Supit, Dan, Studi Ilmu Administrasi Negara, P., Negeri Manado Jl Kampus Unima, U., Tonsaru, K., & Tondano Selatan, K. (2023). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Sma Negeri 2 Tondano. In *Aoej: Academy Of Education Journal* (Vol. 14).
- Farriha Azkia Hanum, & Nida Handayani. (2024). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di Kota Tangerang Selatan. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 191–205.
<Https://Doi.Org/10.62383/Konstitusi.V2i1.416>
- Herdianti, N. F., Awaliyah, N. P., Listari, N. D., Trihantoyo, S., & Nuphanudin, N. (2024). Analisis Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smrn 47 Surabaya. *Yasin*, 4(3), 306–315.
<Https://Doi.Org/10.58578/Yasin.V4i3.2962>
- Kiky Amrynudin, A., Subowo, A., Diponegoro Jlprof Soedharto, U. S., & Tembalang, K. (N.D.). *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sd Di Kabupaten Tegal*.
- Melvin M. Simanjuntak, Adelove Damanik, Herlina Harefa, Junita Hutagalung, & Daniel Syaputra Silaen. (2025). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Guru Uptd Sd Negeri 122345. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1).
- R. K. Arifin. (2008). Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru. *Jurnal Ilmu Politik*, 1.
- Refi Mariska, Annisya Ridhotulloh, Rosmadani, Rizki Ananda, & Nasrul. (2024). Peningkatan Kemampuan Guru Sekolah Dasar Melalui Sertifikasi Guru. *Jurnal*

Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 11(3), 792-806.
<Https://Doi.Org/10.38048/Jipcb.V11i3.3734>

- Sitti Sahara Syamel, & Jusman. (2024). Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar. *Nusra: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1).
- Subekti, R., Rizal, M. S., Ananda, R., Fitra Surya, Y., & Hana Pebriana, P. (2024). Analisis Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Sd Negeri Kecamatan Bangkinang. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 12(1). <Http://Journal.Umpo.Ac.Id/Index.Php/Dimensi/Index>
- Sukarno, S., Munadi, M., & Matin, A. (2021). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. *Jieman: Journal Of Islamic Educational Management*, 3(2), 257-276. <Https://Doi.Org/10.35719/Jieman.V3i2.93>
- Sumarni. (2020). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Pada Smp Negeri Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Yunalis, Y., & Herman, M. (2018). Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru. *Indonesian Journal Of Education Management And Administration Review*, 2(1).
- Yustina. (2025). *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Mamasa*.